BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang merupakan prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara sebagai konsekuensi amandemen Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia berupaya untuk melaksanakan supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menurut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Upaya penegakan hukum yang dilakukan bukanlah sebatas retorika, akan tetapi senantiasa diarahkan demi terwujudnya supremasi hukum. Untuk menyukseskan agenda ini, dituntut komitmen bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibanya untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Tujuan utama peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikatoleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan

berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan peradilan yang fair (*due process*), meliputi antara lain asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*). Cara kerja yang benar dimana seseorang yang dituduh mengalami pemeriksaan atau pengadilan yang jujur dan terbuka. Proses itu harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura atau bukan kepalsuan terencana, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun¹.

Salah satu upaya negara-negara di dunia dalam menjamin hak asasi manusia terhadap setiap orang yang tersangkut dalam proses hukum adalah *Declaration Against and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang telah disahkan pada tanggal 9 Desember 1975 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah pada tanggal 23 Oktober 1985 pemerintah Indonesia menandatangani konvensi ini, yang kemudian ditindak lanjuti dengan ratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1988 tentang pengesahan *Declaration Against and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, pada tanggal 28 September 1988, Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, sebagai konsekuensinya maka kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terhadap tersangka/terdakwa untuk memberikan jaminan hak-hak konsitusional tersebut.

¹ Anthon F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita (Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm.1.

Berkaitan dengan persoalan bantuan hukum, maka pada dasarnya proses penegakan hukum atau proses peradilan di Indonesia juga prinsipnya adalah sangat menjunjung tinggi hak-hak bagi tersangka atau terdakwa khususnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di negara kita, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan dalam bab XI dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 57 bahwa setiap orang yang tersangkut kasus hukum berhak mendapatkan bantuan hukum.

Sejak seorang tersebut sudah ditangkap dan ditahan berhak untuk menghubungi dan mendapatkan bantuan hukum. Didalam undang-undang ini juga menyebutkan bahwa seorang advokad wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan rasa keadilan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ketentuan Pasal 54 menyebutkan “Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang”.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP juga menyebutkan bahwa: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka” dan ayat (2) menyebutkan: “Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Karena ketidakmampuan masyarakat secara *finansial* untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat menjalani suatu perkara pidana dengan tidak terbentur oleh biaya, pada setiap tingkat pemeriksaan, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma / tidak perlu membayar. Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat diberikan pendampingan membela hak-hak hukumnya sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini, bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Dari uraian di atas jelas menunjukkan bahwa persoalan bantuan hukum dalam proses peradilan di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, akan tetapi hal

tersebut masih sering diabaikan oleh para aparat penegakan hukum dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti khususnya terkait dengan persoalan bantuan hukum, maka pada tahun 2015 masih ada perkara pidana yang dimana terhadap terdakwa tidak mendapatkan haknya untuk didampingi dalam proses hukumnya, yang tentunya hal ini adalah merupakan fakta dimana masih terdapat persoalan-persoalan yang jelas sangat bertentangan dengan hukum dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka calon peneliti sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum terkait dengan pemberian bantuan hukum yang akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Gorontalo”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perlu untuk memfokuskan suatu permasalahan yang akan diteliti yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas dalam pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas dalam pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah dipelajari dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan memberikan sumbangan pemikiran serta menambah bahan-bahan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh semasa perkuliahan dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.